



Newsletter

Interfidei

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

Daftar Isi

Editorial	1
Fokus	2
Suplemen	8
Opini	11
Kronik	16
Fitur	26
Refleksi	30
Agenda	32

Penanggung Jawab
Elga Sarapung

Pemimpin Redaksi
Wiwin Siti Aminah

Tim Redaksi
Elga Saparung, Nur Izzah
Millati, Wiwin Siti Aminah

Setting/ Layout
Sarnuji

Dokumentasi
Reta

Kuangan
Eko Putro M dan Vita

Diterbitkan oleh
Institut DIAN/ Interfidei
Jl. Banteng Utama 59,
Perum Banteng Baru
Yogyakarta, 55581,
Indonesia.
Phone.:0274-880149.
Fax.:0274-887864
E-mail
dianinterfidei@yahoo.com
Website
Http://www.interfidei.or.id.

EDITORIAL

Bagi kami, perdamaian bukanlah hal yang didapat begitu saja. Sejarah membuktikan, perdamaian diperoleh dengan kerja keras dan upaya sungguh-sungguh. Setelah didapatpun, perdamaian sungguh harus dipelihara dengan upaya sistematis bukan sekedar proyek jangka pendek yang lembek.

Aksi kekerasan yang seringkali terjadi dengan menggunakan agama sebagai alat legitimasi tentu bukan hal yang baru di negara ini. Meskipun dengan para pelaku yang seringkali diloloskan dari jerat hukum, wacana keagamaan seringkali menjadi alat efektif bagi para pelaku untuk memuluskan kepentingan mereka. Menanggapi hal-hal semacam itu kita tak boleh lengah.

Ketegasan pemerintah menindak para pelaku kekerasan seharusnya dijamin UUD 1945. Pemerintah seharusnya melindungi rakyatnya dari segala macam ancaman. Apapun alasannya, kekerasan terhadap seorang atau golongan tertentu tidak dibenarkan. Meskipun seringkali fakta berbicara sebaliknya. Negara sering absen melindungi rakyatnya bahkan

For us, peace is not a thing simply achieved. History proves that peace was gained through tough and restless effort. Still after acquired, peace must be preserved systematically, not in a matter of a lame short-period project.

Violent action using religion as a legitimating tool is surely not a new kid on the block. The fact that some convicted felons are often managed to get away from law and order proves that the discourse of religion can turn into an effective tool to support their interest.

Government strict initiatives to put the convicts behind bars should be strongly guaranteed by this nation's constitution, 1945 constitution. Government should protect its citizens towards any kind and form of threats. Whatever the reason is, violence to a person or specific group of people cannot be justified. It is so sad that the reality says the opposite; the nation is *in absentia* protecting its citizen; even worse, it tends to limit the rights concerning faith and freedom of thought.

In this edition, we would like to put our perspective into dialogue and reflect various violent actions that cost some lives at some of the

cenderung mengebiri hak-hak berkeyakinan serta berfikir.

Pada edisi ini, kami ingin mendialogkan berbagai pandangan kami menghadapi serta merefleksikan berbagai aksi kekerasan yang seringkali memakan korban. Sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan-kebudayaan, agama-agama, mentalitas-mentalitas yang memang beragama, maka menjadi keniscayaan untuk saling menghargai, mengenal satu sama lain, bukan dalam rangka untuk memberi kategori moral, tetapi supaya tak mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu yang menggunakan kategori-kategori abstrak yang merugikan dan seringkali membutakan. Semoga!

times. As a nation which has cultures, religions and diverse morality, it becomes a necessity to respect each other, know each other, not in terms of giving moral category, but in a way that it is not easily manipulated by some political interests with absurd and blinding categories. Let us hope so... []

*Lebih baik segera
menyalakan lilin, daripada
mengutuk kegelapan*

- Gus Mus -

Merawat Kebhinekaan Dengan Aksi Nyata!

Oleh : Nur Izzah Millati

Ketika terjadi berbagai macam aksi kekerasan di Yogyakarta, saat pihak yang berwenang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat, maka gerakan-gerakan progresif untuk keberagamanpun bergerak bersama menggalang kekuatan untuk perdamaian semua.

Taking Care the Diversity with Real Action!

By: Nur Izzah Millati

When there were a wide variety of violent actions in Yogyakarta, the local authority was not doing their job to protect the people, then progressive movements of diversity moved together to raise power for peace.

Tumpulnya Negara Mengayomi Warga

Sudah sering terjadi aksi kekerasan atas nama agama di negara kita. Negarapun lebih sering tak bertaring menghadapi serangkaian kekerasan yang mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara itu.

Sebuah ironi, pemerintah kembali tak dapat melindungi warganya. Jumat, 13 Januari 2012, ketika kaum muslimin Ahmadiyah sedang melakukan pengajian tahunan dengan tema: "internalisasi nilai-nilai Islam sebagai aktualisasi Jati Diri GAI", Walikota Yogyakarta bersama jajaran Kapolda meminta panitia pengajian tahunan di PIRI menghentikan pengajian tahunan dan PIRI Ekspo. Alasannya, karena kondisi tidak kondusif. Hal yang sama terjadi di Salihara, Jakarta, ketika polisi yang seharusnya melindungi warganya malah

The Blunt Protecting Nation towards Citizens

Violent actions on behalf of religion often happened in our country. The state is more often leaving without further action towards a series of violence endangering the life of the nation.

An irony, that, again, the Government could not protect its citizens. On Friday, January 13, 2012, when the Ahmadiyya communities were conducting annual religious gathering with the theme: "The Internalization of Islamic Values as the Actualization of GAI's identity", the Mayor of Yogyakarta, Hariyadi, with the ranks of regional police officers asked the organizer of the annual religious gathering in PIRI to stop the gathering and also PIRI Expo. The reason was because the condition was no longer conducive. The same thing happened in Salihara, Jakarta, when the police

mengusik sebuah diskusi damai yang sedang berlangsung. Tindakan pemerintah semacam ini tentu tak terjadi sekali itu. Sudah banyak berita yang menyatakan kalau pemerintah selalu saja tidak dapat melindungi warganya dari aksi-aksi kekerasan. Malah mereka melakukan tindakan aneh dengan meminta pihak penyelenggara menghentikan kegiatannya. Bukannya mencegah dan menghentikan orang-orang yang akan dan telah bertindak anarkhis itu.

Sebenarnya bukan berita baru ketika negara tidak memberi perlindungan pada rakyatnya. Sejarah menunjukkan, negara seringkali tidak menunaikan tugasnya. Negara cenderung membuat rakyat merasa terancam, tidak nyaman, hingga menyebabkan banyaknya korban berjatuh. Misalnya, kasus 1965, Tanjung Priok, Semanggi, Ambon, Papua, Poso dan lain sebagainya. Seringkali yang terjadi malah viktimisasi terhadap korban.

Meskipun begitu, sebagai rakyat yang selalu menjadi korban dari kepentingan politik tertentu, maka belajar merefleksikan aksi-aksi itu berdasarkan sejarah kekerasan pada masa lalu adalah satu dari sekian cara preventif agar kita tak mudah diadu domba.

Di era Orde Baru, kita belajar bagaimana wacana atheis digunakan rezim itu untuk menahan atau menyiksa orang-orang yang mereka kategorikan sebagai komunis. Saat itu, banyak pula rakyat yang termakan dengan wacana semacam itu. Selain itu, rezim inipun membuat peraturan mana agama yang mereka legalkan, sehingga diskriminasi sering dialami oleh mereka yang agama atau alirannya tidak diakui negara. Maka identifikasi atau kategorisasi siapa yang diakui, siapa yang tidak, siapa yang sesat, siapa yang beriman, sering menjadi alat ampuh untuk melegalkan kekerasan pada rakyat yang tidak berdosa.

Namun, apakah selalu wacana komunis adalah atheis pada rezim Orde Baru hanya menghasilkan penindasan?. Kita mungkin dapat melihat pada sisi sebaliknya, wacana itu kemudian menjadi produktif bagi rezim ini. Melalui wacana

officers, supposedly protecting its citizens, harassed an ongoing peaceful discussion. This sort of government actions was certainly not happening only once. There have been many reports stating that the Government always failed to protect its citizens from violent actions. They even did a strange action by asking the organizers to stop their activities, instead of preventing and stopping people who would and have acted anarchy.

It isn't really a new news when the state does not provide protection to its citizen. The history showed us that the state often does not perform its task. It tends to make people feel threatened, uncomfortable, and even cause many casualties. For example, the case of 1965, Tanjung Priok, Semanggi, Ambon, Papua, Poso, and so on. It is more often that the state made the victimization of victims.

However, as people who have always been victims of certain political interests, then learning to reflect the actions based on the history of violence in the recent past is one of the preventive ways so that we could not be easily blamed each other.

In the New Order era, we learnt how atheism (communist) was used by the ruling regime to stifle or torture people in such category. At that time, many people were annoyed with that particular discourse. In addition, the New Order regime created a regulation which certain religions are recognized by the state so that the discrimination often experienced by those whose religion was not recognized by the state. Then the identification or categorization of unrecognized religion, or heretical teachings often became a powerful tool to legalize violence towards innocent people.

However, did the "communist is atheist" discourse in the New Order regime always result in oppression? We might want to see on the other side that the discourse went on to become productive for this regime. Through the discourse, they started making some projects like building lighthouses, monuments, and museums as well as creating New Order's regime history and bringing in capital owner to exploit Indonesian natural and human resources.

ini mereka mulai membuat bangunan-bangunan mercusuar, membuat monumen-monumen, museum-museum, pengetahuan-pengetahuan sejarah ala Orde Baru, mendatangkan pemilik modal untuk mengeksploitasi alam dan manusia Indonesia. Sehingga, kita dapat melihat jalan-jalan yang dibangun, mall-mall yang berdiri tegak mengiming-ngimingi orang untuk berbelanja, museum-museum yang mengundang orang untuk berdatangan.

Hal yang sama juga terjadi akhir-akhir ini. Kaum Ahmadiyah yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah, malah diatasi dengan menjatuhkan fatwa MUI atau keputusan Gubernur yang melarang kebebasan kaum minoritas ini. Wacana bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam yang konvensional selalu direproduksi. Sehingga identitas para korban disatukan, dikategorikan sebagai kaum penoda agama. Kenyataan, bahwa mereka telah menjadi korban dari aksi kekerasan diabaikan begitu saja. Sungguh hal yang menyakitkan. Sejarah kelam kekerasan kembali memakan korban.

Belajar dari sejarah, kita melihat pemerintah kita tidak pernah menyelesaikan konflik dengan menangkap serta mengungkap pelaku-pelakunya. Sebaliknya, negara malah mengobarkan perang di mana-mana dengan memanfaatkan wacana yang mereka produksi untuk menyebarkan ketakutan pada rakyat dan selanjutnya memanipulasinya demi kepentingan politik tertentu.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa negara, yang seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat dari segala bentuk kekerasan dan menciptakan kedamaian, malah absen pada banyak aksi kekerasan yang menjadikan warganya sebagai korban.

Negara malah menghilang ketika rakyat membutuhkannya. Aksi-aksi pemerintah itu tentu meresahkan banyak pihak, terutama untuk para korban yang hingga sekarang tidak mendapatkan keadilan yang semestinya menjadi haknya. Karena itu, ruang untuk melakukan kekerasan memang sengaja dibuka lebar-lebar oleh negara, sehingga

Therefore, we can see streets were built; malls stood upright persuading people for shopping; museums invited people to stop by.

The same thing lately happened. Indonesian Ahmadiyya Movement, that should earned government protection, got tackled by MUI's instruction and/or governor's instruction banning the freedom of minorities. The discourse that Ahmadiyya deviates from conventional Islamic teaching is always reproduced over time. It is so that the identity of the victims are combined, and categorized as religious pagan. The fact, that they have been victims of violent action, is ignored. It's sad, knowing that the dark history of violence return with a number of casualties.

Learning from history, we see that our government never really resolves any conflict by capturing as well as uncovering the perpetrators. Instead, the state has waged a war to nearly everywhere by utilizing the discourse that has been produced to spread fear to the citizens and to further manipulate it for the sake of a particular political interest.

The above facts prove that this state, which should become a protector for its citizens from all forms of violence and creating a peace, is absent on many violent actions and thus making its citizens as victims.

The state even seems to vanish when its citizens need it. Such actions by the government are certainly troubling many of us, especially for the victims who are up to now still not getting proper justice as their due. Therefore, it seems like space for violence is deliberately opened wide by the state that anti-diversity group can freely conduct violence.

Political Identification of the Victims

The intolerant groups often described their understanding about Islam as the main factor of the anarchist action. They exhibited their disapproval of Ahmadiyya, LGBT (Lesbian, Gay, bisexual, Transgender) and GKI Yasmin by performing acts of violence against the followers as well as tolerant

kelompok-kelompok anti keberagaman ini leluasa melakukan kekerasan.

Identifikasi Politis Para Korban

Kelompok intoleran sering menyebut pemahaman mereka mengenai Islam sebagai faktor utama aksi anarkhis itu. Mereka mewujudkan ketidaksetujuan tentang Ahmadiyah, LGBT (Lesbian, Guy, Biseksual, Transgender), GKI Yasmin dengan melakukan aksi kekerasan terhadap pengikut serta kelompok yang toleran dengan kelompok-kelompok tersebut. Pertanyaan mengenai mengapa mereka tidak menyampaikan dengan cara-cara lain yang lebih dapat diterima, tanpa kekerasan, tentu hanya dapat dijawab mereka sendiri. Yang mereka nyatakan dihadapan kita adalah ketidaksetujuan mereka tentang wacana tertentu. Sehingga sepertinya mereka sengaja menghadirkan monocausal. Karena orang Ahmadiyah, katanya, percaya pada Mirza Ghulam sebagai nabi, karena Irsyad Mandji lesbian, maka itu menjadi satu-satunya alasan mereka memusuhi hingga menyakiti kelompok minoritas tersebut.

Identitas korban seringkali diseragamkan oleh para pelaku kekerasan. Pengikut Ahmadiyah selalu diberi identitas bahwa mereka percaya Mirza Ghulam adalah nabi. Yang kemudian definisi itu menyalahi dari konsep umum orang Islam. Realitas bahwa Ahmadiyah juga memiliki konsep kenabian yang tak satu dinafikan. Atau realitas, yang seharusnya diketahui semua orang, bahwa umat Ahmadiyah adalah warga Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan, dihilangkan dalam wacana itu. Realitas bahwa orang-orang Ahmadiyah itu juga memiliki keluarga yang harus mereka lindungi, entah sebagai bapak, ibu dan lain-lain, dihilangkan dalam wacana itu. Disinilah keragaman identitas masing-masing individu diseragamkan dengan identitas politis. Dalam kasus Ahmadiyah, identitas bahwa mereka percaya Mirza Ghulam sebagai nabi dijadikan alat untuk melegalkan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Seolah-olah jika menggunakan alasan tersebut, aksi kekerasan itu dapat diterima masyarakat.

groups. As for the question whether they could deliver it in some acceptable and non-violence ways, of course it could only be answered by their own. What they stated so far is their disagreement concerning a particular discourse. Therefore it looks like they accidentally put to present a monocausal. It is, as they said, because the Ahmadiyya believes in Mirza Ghulam as a prophet and because Irshad Mandji is a lesbian, then it can be their only reason to be hostile and hurting the minorities.

The identity of the victim was often unified by the perpetrators of violence. Followers of Ahmadiyya have always been tagged with the identity that they believe Mirza Ghulam as a prophet. The definition then violated the concept of Islam. The reality that the Ahmadiyya also holds the concept of multi prophets was disclaimed. Also the reality, which should be known to everyone that Ahmadis are fellow citizens who have the right to get protection, was removed from discourse. The reality that the Ahmadis also have family they need to protect, either as father, mother or else, was eliminated from the discourse. At this point, the diversity of each individual's identity is unified with political identity. In the case of Ahmadiya, the identity that they believe of the Prophet Mirza Ghulam was made as a means to legalize the violent acts committed. It is as if by using such reason, the violence would be justified by the society.

The distinction or categorization helps them to identify further action against such persons. With categories such as the enemy of God or the enemy of Islam, the anarchist groups seem to affirm themselves as the army of God or the lover of God. Thus, according to the anti-diversity group, those having different stream, sexual orientation, religion or other differences of identity can be treated arbitrarily. This sort of thing is certainly not a new strategy. Manipulating people with clotting identity to the victims was often operated.

Next, we can associate this monocausal with simple things. Say for example, if we want to play soccer. Of course there has to be some things to support like there should be a field, playmates and

Pembedaan atau kategorisasi itu memudahkan mereka untuk mengidentifikasi selanjutnya melakukan tindakan terhadap orang-orang tersebut. Dengan kategori-kategori seperti musuh Allah, musuh Agama Islam, kelompok anarkhis seperti sedang meneguhkan diri, “kamilah pasukan Allah, kekasih Allah”. Dengan begitu, menurut kelompok anti keragaman itu, yang berbeda identitas aliran, orientasi seksual, agama atau perbedaan identitas lainnya boleh diperlakukan semena-mena. Hal semacam ini tentu bukan strategi yang baru. Cara mengadu-domba rakyat dengan pembekuan identitas kepada para korban sudah sering dioperasikan.

Selanjutnya, kita dapat mengasosiasikan monocausal ini dengan hal sederhana. Misalnya jika kita menginginkan sesuatu. Ingin bermain sepak bola contohnya. Tentu harus ada beberapa hal yang mendukungnya, misalnya harus ada lapangan, teman-teman bermain serta bola itu sendiri. Karena itu, kita dapat mempertanyakan hal yang sama pada aksi-aksi kekerasan itu. Jika orang-orang itu sering menyebut penyebab-penyebab tertentu melakukan aksi kekerasan, tetapi jika tidak didukung keadaan tertentu, yang memungkinkan tindakan tersebut, bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya?

Menumbuhkan Benih-benih Perdamaian

Melihat fakta tidak difungsikannya taring hukum negara menghadapi kasus-kasus kekerasan itu, maka satu-satunya harapan adalah masyarakat yang cerdas. Kita mungkin masih dapat bersyukur, ketika ada orang-orang yang bergerak aktif menyuarakan kedamaian serta keadilan untuk para korban. Gerakan inilah yang membangkitkan keoptimisan kita untuk menjaga keindahan kebhinekaan yang sejak dulu telah kita petik buahnya.

Rasanya kita dapat tersenyum sedikit lega, saat melihat dan ikut serta dalam kelompok masyarakat yang selalu menyuarakan perdamaian. Di Yogya misalnya, ada kelompok yang bergabung dalam Aliansi Yogya Untuk Damai (AJI-DAMAI), Gerakan Yogya anti kekerasan (Gerayak),

the ball itself. Therefore, we can question the same thing to those violent actions. Those people often referred to specific causes to conduct violent action. But if they are not supported under certain circumstances, which allow such actions, how can they do it?

Gerakan-gerakan progresif ini mengerti bahwa tindakan anarkhis itu tidak manusiawi. Bahwa identitas seseorang itu beragam. Bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan ketika berhadapan dengan berbagai manusia dengan beraneka latar budaya. Bahwa keragaman haruslah dipelihara dan diberikan ruang untuk ada. Tidak seperti mereka yang menjadi pendukung anti kekerasan pasif, mereka mengerti bahwa tindak kekerasan itu tidak disebabkan perbedaan pendapat mengenai sebuah kasus tertentu. Mereka tahu masalahnya bersumber pada adanya kepentingan politik tertentu yang didukung sebuah rezim.

Cultivating the Seeds of Peace

Seeing the fact that the State Law fails to deal with cases of violence, then the only hope relies on an intelligent society. We might still be grateful that there are some people actively speak up for peace and justice for the victims. This movement evokes our optimism to maintain the beauty of diversity that we have so far lived and enjoyed.

It feels like a small and relieved smile starting to bloom, upon viewing and participating in group voicing peace. In Yogyakarta for example, there are groups like Jogja Alliance for Peaceful Indonesia (AJI-DAMAI), Yogya Non-Violence Movement (Gerayak), Yogyakarta for Diversity (YUK), etc. These movements take on the initiative to campaign peaceful life and remind the nation of its role to

Yogyakarta Untuk Kebhinekaan (YUK), dll. Gerakan-gerakan ini mengambil inisiatif untuk mengkampanyekan kehidupan damai dan mengingatkan negara untuk berperan sebagai pengayom seluruh warganya.

Gerakan-gerakan progresif ini mengerti bahwa tindakan anarkhis itu tidak manusiawi. Bahwa identitas seseorang itu beragam. Bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan ketika berhadapan dengan berbagai manusia dengan beraneka latar budaya. Bahwa keragaman haruslah dipelihara dan diberikan ruang untuk ada. Tidak seperti mereka yang menjadi pendukung anti kekerasan pasif, mereka mengerti bahwa tindak kekerasan itu tidak disebabkan perbedaan pendapat mengenai sebuah kasus tertentu. Mereka tahu masalahnya bersumber pada adanya kepentingan politik tertentu yang didukung sebuah rezim.

Bermunculannya kelompok masyarakat multikultural tersebut tentu menumbuhkan optimisme kita untuk terus menjaga kehidupan multikultur yang telah menjadi warisan paling indah dari leluhur kita. Gerakan-gerakan ini selalu mengingatkan masyarakat agar tak mudah diadu domba dengan wacana tertentu. Dengan perspektif memandang perbedaan sebagai buah dari hasil cipta karya manusia yang harus dihormati, kelompok-kelompok ini terus menerus mendidik pemerintah sekaligus masyarakat pada umumnya, bahwa perdamaian itu harus selalu dirawat dan dijaga dengan berbagai langkah-langkah serta kebijakan sistemik.

Sayangnya, hingga sekarang pemerintah kita masih memandang sebelah mata terhadap kecerdasan rakyat ini. Mereka seolah-olah menutup mata dan telinga tentang betapa masyarakat kita memiliki filter dalam dirinya yang telah dipupuk keluarga atau lingkungan masing-masing untuk menjadi subjek. Bahwa dialog, berdebat, berbeda pendapat adalah sebuah kenikmatan yang terus menerus memberi kedalaman pada keyakinan masing-masing individu. Sudah saatnya, pemerintah belajar dari kehidupan multikultur rakyatnya sendiri.[]

serve and protect its citizens.

These progressive movements understood that anarchist actions are inhumane at all. That one's identity is diverse. That difference is inevitable on dealing with a wide variety of people with diverse cultural background. That diversity must be preserved and given space to exist. Unlike those passively supporting of nonviolence, they understand that violent actions are not due to differences of opinion to a particular case. They realize that the problem begins with the existence of political interest supported by a regime.

The rising number of multicultural groups certainly grows optimism among us to continue preserve multicultural life which has become the most beautiful ancestral heritage. These movements constantly remind the community not to be easily manipulated by a particular discourse. With the perspective of looking at the differences as the fruit of the work of mankind that must be respected, these groups continue to educate government and society in general that peace should always be nurtured and taken care of by various measures as well as systemic policy.

Unfortunately, to these days our Government is still half-heartedly looking at people's intelligence. They seem like closing their eyes and ears on how our society has a filter within, nurtured from each family or neighborhood to be a subject. That the dialogue, debate and different opinions are a pleasure that continuously gives depth to the beliefs of each individual. It is now time for the Government to learn multicultural life from its own people.[]

Konferensi Pers

Terkait peristiwa penghentian pengajian tahunan Gerakan Ahmadiyah Indonesia pada tanggal 13 Januari 2012 di komplek Piri, Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai) menggelar konferensi pers pada tanggal 16 Januari 2012 bertempat di PSI UII. Konferensi pers tersebut sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap pemerintah kota Yogyakarta yang dinilai tidak mampu melindungi keberagaman dan cenderung memihak salah satu kelompok. Peristiwa itu dianggap telah menciderai Jogja City of Tolerance, Jogja sebagai miniatur Indonesia, Jogja sebagai barometer keberagaman di Indonesia.

Press Conference

In relation to the dismissal of the annual religious gathering of Indonesian Ahmadiyya Movement on January 13, 2012 in PIRI Complex, Jogja Alliance for Peaceful Indonesia (AJI Damai) held a press conference on January 16, 2012 at PSI UII. The press conference was held as a form of position statement towards the local government of Yogyakarta which was judged to be incapable of protecting diversity and favoring one particular group. The case was then considered to stain the image of *Jogja City of Tolerance*; Yogyakarta as the miniature of Indonesia and the barometer of diversity in Indonesia.

Berikut isi pernyataan sikap tersebut.

Below is the content of the statement.

Pernyataan Sikap

Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI DAMAI)

Menyikapi Insiden Pembubaran Pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai kota yang mengapresiasi perbedaan. Bahkan Yogyakarta dianggap sebagai miniatur Indonesia. Pelbagai suku, agama, ras, golongan, dst hidup bersama dalam harmoni di sini. Ironisnya, kedamaian itu terkoyak oleh ulah segelintir orang yang mengatasnamakan agama untuk memaksakan kehendak dan melakukan tindakan kekerasan. Mereka membubarkan pengajian tahunan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di SMK PIRI Baciro pada Jumat (13/1).

Position Statement

Jogja Alliance for Peaceful Indonesia (AJI DAMAI)

Addressing the Incident of the Dismissal of Religious Gathering of Indonesian Ahmadiyya Movement (GAI) in Yogyakarta

Yogyakarta Special Region (DIY) is known as a town that appreciates differences. Yogyakarta is even considered as the miniature of Indonesia. Various ethnic, religion, race, and class live together in harmony in this very town. Ironically, such peace was torn apart by the action of a handful of people taking on behalf of religion, forcing will and conducting violent acts. They dismissed the annual religious gathering of Indonesian Ahmadiyya Movement (GAI) at SMK PIRI Baciro on Friday (13/1/2012).

Selain itu, amat disayangkan sikap Wali Kota, jajarannya, dan aparat keamanan yang justru mengakomodir keinginan sepihak tersebut. Padahal, panitia pengajian sudah memberitahukan sejak 28 Desember 2011 silam. Sehingga aparat kepolisian wajib mengamankan, bukan justru membubarkan. Tindakan Wali Kota yang tunduk pada tekanan kelompok yang anti keberagaman, niscaya membuka peluang terjadinya insiden serupa di masa depan. Tak hanya di Yogyakarta tapi juga di daerah lain. Padahal jauh-jauh hari Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengkubuwono X) sudah berkomitmen melindungi Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya di bumi Mataram.

Peristiwa tragis tersebut jelas sangat bertentangan dengan kultur masyarakat Jogja yang beragam dan keberagaman itu justru menjadi kekayaan bangsa sekaligus potensi untuk melakukan kerja bersama demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Bukankah Islam juga sudah mengisyaratkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat (*ikhtilafu ummati rahmatun*).

Oleh sebab itu, AJI DAMAI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk aksi pembubaran pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).
2. Tindakan pembubaran pengajian telah menciderai semangat Jogja City of Tolerance dan bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945).
3. Mengingatkan Wali Kota Yogyakarta dan jajarannya untuk konsisten:
 - a. Menjaga kota Jogja sebagai City of Tolerance.
 - b. Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah, berekspresi, berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa diganggu oleh pihak manapun.
4. Menuntut Wali Kota Yogyakarta dan jajarannya untuk:
 - a. Menjelaskan alasan pembubaran pengajian GAI di kompleks PIRI tersebut.

In addition, it is very unfortunate to see that the Mayor along with the ranks of security apparatus accommodated the interest of a particular side. The fact is that the committee of the annual religious gathering had previously informed the event since December 28, 2011. Therefore, the police officers were obliged to secure the event, not to dismiss it. The Mayor's reaction, subjecting to the pressure from the anti diversity group, undoubtedly opens opportunities of a wake of similar incidents sometime in the future, not only in Yogyakarta but also in other areas. The sad thing is that it happened though previously Ngarso Dalem (*Sri Sultan Hamengkubuwono X*) had already committed to protect Ahmadiyah and other minority groups in the land of Mataram.

This tragic event is obviously against the diverse culture of people in Yogyakarta though diversity is considered as national wealth and a potency of togetherness in order to achieve justice and social welfare. Doesn't Islam hint that difference is a form of grace (*ikhtilafu ummati rahmatun*).

Therefore, AJI DAMAI delivered the position statement as follow:

1. Condemning the dismissal of the annual religious gathering of Indonesian Ahmadiyah Movement's (GAI)
2. The dismissal has stained the spirit of Jogja City of Tolerance and is against Pancasila and the Constitution (UUD 1945).
3. Reminding the Mayor of Yogyakarta and his ranks to be consistent in:
 - a. Keeping Yogyakarta as the City of Tolerance.
 - b. Ensuring the freedom of every citizen to conduct religious ritual, express opinion, associate and gather, without being disturbed by any party.
4. Demanding the Mayor of Yogyakarta and his ranks to:
 - a. Explain the reasons for dismissal of religious gathering of GAI at PIRI complex.
 - b. Apologize in public.

- b. Meminta maaf di hadapan publik.
- c. Menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Lembaga-lembaga yang turut serta dalam Pernyataan Sikap AJI Damai ini ialah DIAN/Interfidei, Forum LSM, FPUB, GAMKI, IPPAK Universitas Sanata Dharma, IRE, Jaringan Islam Kampus, Jembatan Persahabatan, Komunitas Warna Kampus UGM, LPN, LSIP, LSKP, NIM, PADII, PKBI, PLIP Mitra Wacana, PSI UII, PW Fatayat NU DIY, PC Fatayat NU Kota Yogyakarta, Rumpun Nusantara, RTND, SIM-C, SOS Desa Taruna Indonesia, SP Kinasih, Suluh Perdamaian, Syarikat Indonesia, Sunda Wiwitan, YASANTI, YLKIS, YPR.

Yogyakarta, 17 Januari 2012

- c. Ensure that similar incident will not happen again at the future.

Institutions participating in Position Statement of AJI Damai are: DIAN/Interfidei, NGO Forum, FPUB, GAMKI, IPPAK of Sanata Dharma University, IRE, Islamic University Network, Jembatan Persahabatan, Komunitas Warna of UGM, LPN, LSIP, LSKP, NIM, PADII, PKBI, PLIP Mitra Wacana, PSI UII, PW Fatayat NU DIY, PC Fatayat NU of the city of Yogyakarta, Rumpun Nusantara, RTND, SIM-C, SOS Indonesian Taruna Village, SP Kinasih, Suluh Perdamaian, Syarikat Indonesia, Sunda Wiwitan, YASANTI, YLKIS, YPR.

Yogyakarta, January 17, 2012

“Manusia seringkali menjadi seperti apa yang ia yakini. Jika saya terus menerus berkata kepada diri sendiri bahwa saya tidak dapat melakukan hal tertentu, mungkin saja pada akhirnya saya memang tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, jika saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat melakukan, maka pasti saya akan mampu melakukannya meskipun pada awalnya saya tidak memiliki kemampuan untuk itu.

- Mahatma Gandhi -

MANIFESTO YOGYAKARTA UNTUK KEBHINEKAAN

Kebinekaan adalah kenyataan hidup sehari-hari yang tak bisa dipungkiri di Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan negara Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama dan suku tertentu. Rumusan itu melandasi semangat bangsa yang toleran, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi kemerdekaan berpikir dan berpendapat.

Catatan panjang sejarah menunjukkan bahwa Yogyakarta – sebagai kota pendidikan dan salah satu pusat kebudayaan Jawa – selalu memberi ruang bagi keberagaman budaya serta kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Kemampuan itulah yang membentuk keistimewaan Yogyakarta.

Akhir-akhir ini, marak terjadi peristiwa kekerasan atas nama agama, suku, dan kelompok. Kami warga Yogyakarta menyatakan :

1. Menolak intimidasi dan aksi kekerasan atas alasan apapun, sebab intimidasi dan aksi kekerasan atas nama perbedaan agama, suku, kelompok, gender, dan ideologi, sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip kebinekaan.
2. Mendukung aparat negara untuk menindak berdasarkan hukum, setiap individu ataupun kelompok yang melakukan intimidasi dan aksi kekerasan.
3. Mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai kebinekaan, agar tidak membiarkan aksi kekerasan dan intimidasi yang melanggar hak-hak sipil warga.

Oleh Karena itu kami warga Yogyakarta mengajak bangsa Indonesia untuk bersikap mendukung dan menjaga kebinekaan Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juni 2012

YOGYAKARTA MANIFESTO FOR PLURALISM (KEBHINEKAAN)

Pluralism (kebhinekaan) is an inevitable fact in Indonesia. The founders of this nation have been formulated Indonesia as a nation based on Pancasila, not based on particular religion or ethnicity. The formula then underlies the spirit of the tolerant nation, appreciates the diversity and upholds the independence of thought and opinion..

A long record of history showed that Yogyakarta -as a city of education and as one of Javanese culture centre – always makes way for cultural diversity and the freedom of thought and opinion. This forms the privilege of Yogyakarta.

Recently, rampant violent events occurred on behalf of religion, ethnicity and groups. We, the citizens of Yogyakarta, states:

1. To turn down any intimidation and violent actions for whatever reasons because intimidation and violent acts in the name of religious differences, ethnicity, groups, gender and ideology are not in line with the pluralistic principle
2. To support the nation's apparatus to enforce the law towards any individual or groups that performs the intimidation and violent acts.
3. To call for the entire community to respect and appreciate the diversity, in order not to let the violence act and intimidation that violate the civil rights of the citizen.

Therefore, we, the citizens of Yogyakarta, call upon all citizens of Indonesia to support and keep the Indonesian's diversity.[]

Yogyakarta, June 24, 2012

Kasus Irshad Manji: 'Kegamangan' Majority dan Ancaman bagi Demokrasi

Oleh Siti Habibah Jazila*

Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kembali tercabik-cabik. Tepatnya pada 9 Mei lalu, saat sekelompok orang secara paksa, disertai tindakan anarkhis, membubarkan diskusi buku "Allah, Liberty and Love" di Pendopo Yayasan LKIS Yogyakarta. Semboyan NKRI tersebut kembali terciderai karena aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama sebagai reaksi atas ketidaksetujuan dan pemaksaan kehendak telah terjadi berulang kali di negeri ini. Kasus kekerasan terhadap jama'ah Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia adalah beberapa contoh dari aksi kekerasan tersebut.

'Kegamangan' Majority

Terkait kasus Irshad Manji, masyarakat sipil berbeda-beda menyikapinya: ada yang secara tegas menentang dan melawan tindakan anarkhis tersebut dan menyatakan bahwa pelaku kekerasan harus ditindak tegas secara hukum. Ada yang menentang tindakan kekerasan tersebut namun juga menyatakan bahwa memfasilitasi diskusi bersama Irshad Manji mendatangkan lebih banyak madharat (efek negatifnya) daripada masalah (efek positif/manfaatnya), dikarenakan orientasi seksual Manji. Manji memang secara terbuka mengakui dirinya sebagai lesbian meskipun bukunya tidak secara spesifik membahas tentang homoseksual. Dan ada juga yang gamang dengan memilih diam menyikapi hal ini.

Kelompok yang memilih sikap pertama sering dituduh sebagai kelompok liberal, amoral dan anti agama, karena dianggap membenarkan dan membela homoseksual. Kelompok ini juga sering

The Case of Irshad Manji: The Majority Nervous' and the Threat to Democracy

By: Siti Habibah Jazila

Bhinneka Tunggal Ika, or Unity in Diversity, as the national slogan of the Republic of Indonesia was once again being torn apart. Precisely on May 9th, a group of people by force and by acts of anarchy dismissed the book discussion of "Allah, Liberty and Love" at LKIS Foundation Hall, Yogyakarta. The slogan of NKRI was again stained by the violent actions taking on the behalf of religion in response to disagreement and impositions of will, happening repeatedly in this nation. Cases like violence against Ahmadiyya congregation, GKI Yasmin, and Filadelfia HKBP are some of the examples of violent actions.

Majority 'Nervous'

In relation to Irshad Manji's case, the society made different responses: some were straightly opposing the anarchy and stating that the perpetrators of violence must be taken into action by law. Some are opposing the violent action but also stating that facilitating discussion of Irshad Manji would draw more madharat (negative effects) than mashalah (positive effect/benefits) due to Manji's sexual orientation. Manji is openly acknowledging herself as a lesbian even though the book does not specifically discuss about homosexual. Some were even nervously silent upon addressing this case.

The group choosing the first stance was often accused of being a liberal, amoral and anti-religion group, because they were considered to justify and defend homosexual. This group was also often misunderstood as those 100% agreeing the idea of Irshad Manji by her book. The fact is that there was a few of within the groups, including the organizer of Irshad Manji's book discussion, critically reading and responding to Irshad Manji's arguments. One thing that was clearly in struggle by this group is

*Pegiat Jaringan Perempuan Yogyakarta/JPY

disalahpahami sebagai kelompok yang 100% setuju dengan gagasan Irshad Manji yang dituangkan dalam bukunya. Padahal tidak sedikit dari kelompok ini termasuk juga para penyelenggara diskusi buku Irshad Manji yang membaca dan menanggapi secara kritis argumen-argumen Irshad Manji. Satu hal yang jelas diperjuangkan oleh kelompok ini adalah kebebasan berfikir, berpendapat dan berdiskusi serta melawan segala bentuk kekerasan atas nama apapun. Propaganda kelompok anti keragaman terhadap kelompok tersebut membuat mereka dieksklusi dari masyarakat dan tidak jarang menerima teror serta ancaman dari kelompok radikal yang melakukan tindak kekerasan. Di dalam selebaran yang disebar oleh sekelompok orang yang menyerang diskusi di Yayasan LKIS terdapat statemen “Siapa saja yang memfasilitasi acara-acara Irshad Manji di Indonesia, berarti mereka memfasilitasi aktivitas musuh agama dan musuh negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu mereka juga musuh umat beragama”.

Pilihan sikap kedua dan ketiga tersebut pada titik tertentu, menurut saya berbahaya. Karena dengan mengatakan bahwa memfasilitasi diskusi dengan Irshad Manji lebih berefek negatif dikarenakan orientasi seksualnya, terdengar seperti “karena dia lesbi maka lebih baik tidak mengadakan diskusi dengannya”. Hal ini secara tidak langsung mendidik masyarakat kita untuk membatasi hak orang lain yang memiliki identitas yang berbeda dengan identitas yang mainstream. Sikap ini juga bisa dimaknai sebagai sikap yang menyalahkan para korban (penyelenggara dan peserta yang mengikuti diskusi). Pilihan ketiga bisa dianggap mengamini tindakan anarkhis tersebut atau sikap yang ignorance atau masa bodoh.

Absennya Negara: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi dan NKRI

Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945

freedom of speech, thought, and discussion, as well as opposing any form of violence. The propaganda from anti-diversity group made this group excluded from the society and to some of the time receiving terrors and threats from radical group which often carry out violence action. In a leaflet distributed by the group of people attacking the discussion in LKIS Foundation, there was single line of statement: "Anyone facilitating Irshad Manji's events in Indonesia is facilitating the activities of the enemy of religion and the enemy of the nation which is based on the belief of the Almighty God. Therefore, they are also the enemy of religious believer".

The second and third stances, at a certain point, seem dangerous to me. It is because by saying that facilitating discussion with Irshad Manji result in a more negative effect due to her sexual orientation, it sounds like saying "Because she is a lesbian, it'd be better to not having a discussion with her". This indirectly educates our society to restrict the rights of having anti-mainstream identity. This attitude could also be taken as blaming the victim (both the organizer and the participants of the discussion). The third stance could then be considered into agreeing the anarchy or the ignorance attitude.

The Absence of the Nation: Real Threat to Democracy and NKRI

Pancasila as the basis for the State, UUD 1945 as the State Constitution and the democratic system should make Indonesia having strong foundation to manage its diversity and keep nation's integrity. Diversity and difference in democracy are inevitable. Any attempts to force singularity towards diversity by anarchy should be considered by the State apparatus as a real threat for the unity of NKRI.

The freedom of religion, belief and opinion and expression are guaranteed by this nation's Constitution (article 28E, paragraph 1, 2 and 3). Act No. 39 year 1999 concerning human right also

Satu hal yang jelas diperjuangkan oleh kelompok ini adalah kebebasan berfikir, berpendapat dan berdiskusi serta melawan segala bentuk kekerasan atas nama apapun.

sebagai konstitusi negara dan sistem demokrasi seharusnya menjadikan Indonesia mempunyai landasan yang kuat untuk mengelola keragaman dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Keragaman dan perbedaan dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang tak terelakkan. Upaya-upaya yang hendak menyera g a m k a n keragaman tersebut dengan cara pemaksaan kehendak melalui cara-cara yang anarkhis hendaknya dilihat oleh



para aparatur negara sebagai ancaman yang nyata bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebebasan beragama, berkeyakinan serta berpendapat dan berekspresi, sejatinya telah dijamin oleh konstitusi negara ini (Pasal 28E ayat 1, 2, dan 3). Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat jaminan kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, terutama pada pasal 4, pasal 12 dan pasal 22. Pasal 4 UU HAM menegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sayangnya jaminan ini sama sekali tidak berbunyi dalam kasus Irshad Manji. Kasus penghentian diskusi di Salihara oleh pihak kepolisian dan sikap polisi yang malah sibuk menanyakan surat ijin diskusi ke pihak kepolisian di Yayasan LKIS, setelah kasus penyerangan dan pembubaran paksa diskusi oleh kelompok anarkhis, menjadi bukti nyata tak terbantahkan.

Aparat kepolisian tidak hanya pasif dalam

reinforces freedom of speech, religion and belief, especially on article 4, article 12 and article 22. Human Right Act, Article 4, states that the freedom of thought, conscience and religion are human rights that cannot be reduced under any circumstances. Unfortunately this assurance fails to prove out right in the case of Irshad Manji. The case of the dissolution of discussion in Salihara by the police and their attitude of asking police's license

discussion to LKIS Foundation following the case of assault and forced dissolution of the discussion by anarchist group became tangible evidence.

Police apparatus was not only being passive in cracking down the perpetrators of violence who were on behalf of religion, but they also tolerated and supported the action. By pressing the organizer to disperse the discussion (Salihara's case) and busy questioning the license rather than immediately asking for a description of related assault (LKIS Foundation's case), police officers have been positioning themselves to be on the side of the anarchist group. Attitude like this should be construed as giving space to anarchist group to take similar action at later days.

Building Optimism

Because this nation has agreed to establish Pancasila as its basis and UUD 1945 as its Constitution, the struggle to look after nation's diversity and to oppose any attempts to force singularity is continuously kept. Some of the efforts that need further development and continuation are:

menindak pelaku-pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, tetapi juga telah mentolerir dan mendukung tindakan tersebut. Dengan menekan pihak penyelenggara diskusi untuk membubarkan diskusi (kasus di Salihara), sibuk mempertanyakan surat ijin dan bukannya segera meminta keterangan terkait penyerangan (kasus di Yayasan LKIS), aparat kepolisian telah memposisikan diri berada di pihak kelompok-kelompok anarkhis tersebut. Sikap seperti ini dapat diartikan sebagai pemberian ruang kepada kelompok-kelompok anarkhis tersebut untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Membangun Optimisme

Karena bangsa ini telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusinya, perjuangan untuk merawat kebinekaan dan menentang upaya penyeragaman harus terus menerus ditumbuhkembangkan. Beberapa upaya yang perlu ditumbuhkan dan dilanjutkan: (1) membumikan pendidikan multikultural lintas generasi. Dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan dan intoleransi, menghidupkan kembali pendidikan multikultural dengan bahasa dan pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat luas menjadi kebutuhan yang mendesak; (2) Pendidikan HAM yang komprehensif bagi aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan internalisasi tentang tugas utama mereka: menegakkan hukum dan berpihak pada kepentingan HAM bukan kepentingan kelompok/golongan; (3) memperkuat gerakan masyarakat sipil untuk menentang segala bentuk kekerasan dan upaya-upaya penyeragaman yang mengancam demokrasi dan keutuhan NKRI dengan cara kerja berjejaring lintas isu. Memperkuat konsolidasi gerakan ini sangat penting mengingat perjuangan isu keragaman seringkali tidak mendapat jaminan keamanan dari negara. Dalam konteks ini advokasi di tingkat internasional juga menjadi kebutuhan yang krusial.[]

(1) Introducing multicultural and cross-generational education. With rising cases of violence and intolerance, reviving multicultural education with language and approach that are easily accepted by the community at large becomes urgent needs; (2) A comprehensive Human Right Education for law enforcement officers, aiming to provide insight and internalization of their primary task: enforcing the law and in favor to Human Right interests and not to the interests of particular group; (3) Strengthening civil society movement to oppose all forms of violence and attempts to force singularity that threaten democracy and the integrity of Indonesia through networking cross-issues. Strengthening the consolidation of civil society movement is extremely important given that the struggle of diversity issue often receives no security assurance from the nation. In this context, advocacy at international level also becomes a crucial need.[]

Kebebasan beragama, berkeyakinan serta berpendapat dan berekspresi, sejatinya telah dijamin oleh konstitusi negara ini (Pasal 28E ayat 1, 2, dan 3). Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat jaminan kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, terutama pada pasal 4, pasal 12 dan pasal 22. Pasal 4 UU HAM menegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

KRONIK

CRONIC

Sekolah Lintas Iman 3 (SLI-3)

Sekolah lintas Iman tahun ini, yang dilaksanakan dari 11 Februari sampai 20 Mei, diikuti oleh 20 orang. Dengan niat mulia masing-masing peserta untuk membuka diri berdialog satu sama lain, mempertanyakan ajaran agama orang lain, bahkan menanyakan, mempertajam keyakinan mereka masing-masing.

Sekolah Lintas Iman ini adalah hasil kerjasama antara Fak. Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Fak. Teologi Universitas Sanata Dharma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Institute DIAN/Interfidei. Kerjasama ini telah dimulai sejak awal berdirinya SLI yaitu pada tahun 2010.

Para peserta berkunjung ke berbagai tempat. Misalnya; ke Kemenag, Rifka Annisa, CRCS (Cross Religious and Cultural Studies) UGM, PSKP (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) UGM dan diakhiri dengan live in di Vihara Mendut. Masing-masing peserta diberi waktu untuk merefleksikan apa yang telah didialogkan dalam bentuk tulisan, lukisan, mengarang lagu dan sebagainya.

Ketika peserta bertandang ke kantor Interfidei, Elga Sarapung (direktur Interfidei) mengatakan, bahwa dialog antar umat beragama sudah umum dilakukan dan lebih mudah diterima antar golongan, tetapi yang masih agak sulit adalah dialog intra-agama yang berkaitan dengan antar-madzhab, sekte atau denominasi, dalam satu agama. Kecurigaan antar aliran yang mengeras akhir-akhir inipun menjadi wujud dari sulitnya dialog di kalangan internal umat beragama.

Interfaith School 3 (SLI-3)

The Interfaith School Program (SLI) of this year (February 11th to May 20th, 2012) was attended by 20 participants. With the goodwill from each of them, the participants tried to open up themselves and have a dialogue with each other, to question the teachings of other religions, even sharpen their beliefs respectively.

The Interfaith School is a program made under the cooperation between Faculty of Theology Duta Wacana Christian University, Faculty of Theology Sanata Dharma University, Sunan Kalijaga Islamic State University, and Institut DIAN/Interfidei. This collaboration has started since the beginning of the Interfaith School program, namely in 2010.

The participants visited various places, for example: The Religious Affairs Ministry of Yogyakarta, Rifka Annisa Women's Crisis Center, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Gadjah Mada University, Center for Security and Peace Studies (CSPS) Gadjah Mada University, and ended up with a live-in program at Vihāra Mendut, Magelang. Each participant was given time to reflect on what had been discussed in the form of writing, painting, composing song, and so forth.

When participants visit to Interfidei's Office, Elga Sarapung (the director of Interfidei) said that inter-faith dialogue was commonly held and easily accepted by different groups; but one thing which still difficult to manage is intra-faith dialogue related to a different school (mazhab), sects or denomination within a religion. Suspicion among sects happened recently was a proof of how hard to hold an intra-faith dialogue.



Peserta SLI-3 berfoto bersama dengan Bhikkhu Sri Pannavaro Mahatera di Vihara Mendut

Diskusi Bulanan “Gerakan Provokator Damai: Membangun Dialog Lintas Iman dan Perdamaian Berbasis Komunitas”

Pembicara : Jacky Manuputty & Abidin Wakano (Aktivis Lembaga Antar-Iman Maluku/LAIM)

Tempat : Kantor Interfidei

Waktu : 29 Maret 2012

Perdamaian adalah harapan paling indah bagi masyarakat yang sedang konflik. Konflik di Ambon telah menelan banyak korban, cukup sudah masyarakat tak berdosa menjadi korban dari kerusuhan. Oleh karena itu, proses perdamaian harus didorong dan diprovokasi dengan landasan keyakinan bahwa potensi damai ada pada setiap orang, namun tidak banyak yang mau mengekspresikan dan memperjuangkan atau menawarkannya ke publik karena merasa terancam atau tidak menguntungkan secara ekonomi.

Agar harapan itu terwujud maka harus ada usaha maksimal dari masyarakat. Gerakan Provokator Damai merupakan ikhtiar pemuda-pemudi Ambon sebagai upaya mewujudkan masyarakat damai. Berbagai kegiatan positif yang selalu melibatkan masyarakat sebagai subjek pun terus diagendakan gerakan pemuda ini. Gerakan ini melakukan provokasi kepada masyarakat agar mengkontribusikan apa saja yang bisa menciptakan perdamaian.

Kata provokator sengaja dipilih pemuda-pemudi ini dengan alasan antara lain karena perdamaian tidak harus menjadi sesuatu yang natural, yang memakan waktu yang cukup lama untuk terwujud sehingga kemungkinan semakin banyak korban berjatuh. Dalam konteks inilah perlu sekali mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian.

Salah satu hasil nyata yang telah dipetik gerakan ini adalah saat kericuhan yang terjadi pada

Monthly Discussion “Peace Provocateur Movement: Building the Inter-faith Dialogue and Community-Based Peace

Speakers: Jacky Manuputty & Abidin Wakano

Place: Interfidei's Office

Time: March 29, 2012

Peace is a longing hope for the society which lives in conflict. Conflicts in Ambon have swallowing many victims; it is enough for innocent people becoming victims in these riots. Therefore, the peace should be encouraged and provoked by the belief that peace itself is within everyone; but not all people are willing to express, fight for or offered to the public since they feel threatened or they think that peace is not economically profitable.

In order to make that hope into a reality there should be a maximum effort from the society. Peace Provocateur Movement is an endeavor of Ambon youths to create a peaceful society. Various positive activities involving the society are always scheduled by this youth movement. The movement provokes the society

to give a contribution that can create peace.

There was a reason why the word 'provocateur' was chosen by this youth movement; peace does not have to be natural; meaning to say that the process of creating peace in natural way might take a lot of times and more victims. Therefore, it is important to encourage people to participate in creating peace.

One of the tangible results made by this movement could be seen from the incident in September 2011, where the national mass media call that incident as a 'riot' (it was the same as in 1999). This movement tried to block the media so that they did not present any provocative word, and finally 4 hours later the word 'riot' was changed to 'brawl'.

Sekolah Lintas Iman ini adalah hasil kerjasama antara Fak. Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Fak. Teologi Universitas Sanata Dharma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Institute DIAN/ Interfidei. Kerjasama ini telah dimulai sejak awal berdirinya SLI yaitu pada tahun 2010.

September 2011 lalu, media massa nasional sudah memposisikan peristiwa itu seperti tahun 1999 dengan bahasa “kerusuhan”. Gerakan ini kemudian berusaha “mengepung” media-media tersebut supaya tidak menyajikan bahasa yang provokatif, dan akhirnya 4 jam kemudian kata “kerusuhan” diganti menjadi “kericuhan”. Setelah itu gerakan yang terdiri dari pemuda lintas iman ini, terus memonitor

perkembangannya dan melakukan updating data selama 24 jam. Dalam hal ini mereka membagi-bagi tugas, ada yang collecting data, verifikasi data, klasifikasi isu-isu dan ada yang melakukan perlawanan terhadap media nasional.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, menggunakan diri sendiri dan relasi untuk mempromosikan perdamaian. Dari segi tempat mereka melakukan promosi secara berpindah-pindah dan memperbanyak kelompok dan jaringan untuk menjamin keamanan bagi mereka sendiri. Selain itu karena masyarakat di Ambon sudah tersegregasi berdasarkan agama, maka mereka juga menciptakan ruang-ruang integrasi dengan metode mengkreasi pertemanan dari individu ke kelompok, lalu melebarkannya dan juga memperbanyak.

Diskusi Bulanan “Gerakan Filantropi Islam di Indonesia”

Pembicara: Hilman Latief (Dosen Fakultas Agama Islam UMY)

Tempat : Kantor Interfidei

Waktu : 16 April 2012

Gerakan Filantropi Islam merupakan fenomena baru yang muncul di Indonesia. Gerakan ini dimotori kelas menengah atas sebagai andil besar mereka untuk memberikan pertolongan pada kaum marginal. Secara administratif, gerakan ini tertata

Gerakan Provokator Damai merupakan ikhtiar pemuda-pemudi Ambon sebagai upaya mewujudkan masyarakat damai. Berbagai kegiatan positif yang selalu melibatkan masyarakat sebagai subjekpun terus diagendakan gerakan pemuda ini. Gerakan ini melakukan provokasi kepada masyarakat agar mengkontribusikan apa saja yang bisa menciptakan perdamaian.

After that, this youth movement, which consists of inter-faith young people, did the monitoring and data updating for 24 hours. They divided the tasks, such as: collecting the data, verifying the data, classifying the issues, and blocking the national mass media.

They used their own effort and asked for help from their acquaintance to promote peace. In terms of place, they promoted peace by moving

from one place to another. They also gathered more people to join the movement to ensure the security of their own. In addition, because the society in Ambon had been segregated by religion, this movement created spaces of integration by combining the kind of friendship (from an individual to a group, and then they enlarge and widen it).

Monthly Discussion “Islamic Philanthropy Movement in Indonesia”

Speaker : Hilman Latief (Lecturer at the Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Yogyakarta/UMY)

Place : Interfidei's Office

Time : April 16, 2012

Islamic Philanthropy movement is a new phenomenon emerging in Indonesia. This movement was driven by the upper middle class as their big effort to provide aid towards the marginalized group. Administratively, this movement is organized professionally so that it can develop rapidly.

Within Indonesian context, the birth of religious charitable organizations (Non-Governmental Organizations' based) had the background of at least two crises, political crisis and economic meltdown. Islamic philanthropic institutions appear to respond the Government's

secara profesional sehingga dapat berkembang pesat.

Dalam konteks Indonesia, kelahiran organisasi-organisasi amal keagamaan, berbasis LSM /NGO, ini dilatarbelakangi setidaknya dua krisis, yakni krisis politik dan krisis ekonomi. Lembaga-lembaga filantropi Islam muncul untuk menanggapi kegagalan pemerintah dalam melayani seluruh warganya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Karena krisis tersebut maka perlu membuat suatu gerakan untuk menggalang dana dari masyarakat [melalui zakat, infaq dan shadaqah] dalam rangka menolong masyarakat itu sendiri.

Gerakan filantropi Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup menarik dan signifikan terutama Pasca Orde Baru. Menurut Hilman, hal tersebut dapat dipahami karena pada era pasca Soeharto terdapat beberapa fenomena yang mendorong munculnya lembaga-lembaga amal berbasis keagamaan seperti adanya suasana politik yang baru dan lebih terbuka, terjadinya beberapa konflik komunal dan beberapa peristiwa bencana alam yang cukup besar [seperti gempa, tsunami dan letusan gunung Merapi].

Beberapa lembaga Filantropi Islam yang muncul dan berkembang sampai sekarang adalah Dompot Dhu'afa [Republika], Rumah Zakat, LazizNU [Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama], LazisMU [Lembaga Amil Zakat dan Shodaqah Muhammadiyah], Dewan Da'wah Infaq Club, BSMI [Bulan Sabit Merah Indonesia], PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat].

Menurut Hilman kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut masih terkonsentrasi pada aspek-aspek yang populis dengan membuat program-program untuk penyantunan, perbaikan tempat ibadah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, atau juga pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Belum ada konsep yang mereka tawarkan mengenai pembenahan sistemik terhadap permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi-politik di negara yang masih banyak korban pemiskinan sistemik ini.

failure in providing service to all its citizens in order to create justice and social welfare. Thus, due to the crisis, it is necessary to create a movement to raise funds from the public [through zakat/alms, infaq and sadaqah/charity] in order to help the community itself.

Islamic philanthropy movement in Indonesia is experiencing an interesting and significant development, especially in the post-New Order era. According to Hilman, it is understandable because in the post-Soeharto era there are several phenomena that encourage the emergence of religious charitable institutions such as the new and more open political atmosphere, the occurrence of communal conflicts and some major natural disasters [such as earthquakes, tsunami and volcanic eruptions of Mount Merapi].

Some institutions of Islamic Philanthropy have emerged and evolved, existing until now like Dompot Dhu'afa [Republika], Rumah Zakat, LazizNU (The Nahdlatul Ulama Alms Agency), LazisMU [The Muhammadiyah Alms Agency], Da'wah Council Infaq Club, BSMI [Red Crescent Indonesia], PKPU [Postal Fairness Caring Ummah].

According to Hilman, activities of those institutions are still concentrated on populist aspects by creating programs of donation, fixing places of worship, economic empowerment, health services, or also providing scholarships for unfortunate children. There has not been such a concept of systemic reform to solve the social, economic and political problems in this country where there are still many victims of this systemic impoverishment

The Students' Visit from STAIN Kudus and UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A meeting is a starting point of a dialogue. The meeting between various people who have a willingness to know deeper on how they define as well as do the dogma (which they have heard, seen, read, from intermediary point of view), try to be cross checked, given 'quotation marks' through face to face interaction and direct conversation between

Kunjungan Mahasiswa dari STAIN Kudus dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pertemuan adalah awal sebuah dialog. Perjumpaan antara manusia yang berbeda di mana masing-masing ingin mengenal lebih dalam tentang bagaimana mereka memaknai serta menjalankan ajaran-ajaran agama, yang selama ini sering didengar, dilihat, dibaca, melalui sudut pandang perantara, mencoba untuk di cross-check, diberi tanda kutip melalui tatapan muka, pembicaraan langsung antar berbagai kelompok yang beraneka adalah gambaran dari dialog antar-iman.

Adalah Intelektual muda Islam semester 2-6 dari Kudus dan Bandung mengambil langkah berani dengan mengenal langsung apa yang selama ini tak mereka akrabi. Mereka sengaja belajar dari berbagai organisasi aktif yang bergerak dalam bidang dialog antar agama untuk proses refleksi mereka sebagai umat beragama.

Sekira 130 mahasiswa, yang dibagi dalam dua gelombang kedatangan (1 dan 14 Mei 2012) dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus, jurusan Pendidikan Agama Islam bertandang ke Interfidei. Mereka mempelajari bagaimana kami sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada pluralism dan dialog antar iman merancang sekaligus menjalankan aktivitas untuk visi kedamaian untuk semua.

Di bimbing Anisa Listiana, M.Ag [Dosen Perbandingan Agama], setelah berkunjung di interfidei, mereka melanjutkan perjalanan bertemu dengan Komunitas Hare Krishna untuk belajar tentang Hindu.

Hal yang sama juga dilakukan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama. Pada

the various groups is the picture of inter-faith dialogue.

Islamic young intellectuals in semester 2-6 from Kudus and Bandung took a courageous step by getting to know directly what they haven't known before. They deliberately learned from various organizations that actively engaged and focus on inter-faith dialogue; this was a reflecting process for them as religious people.

Approximately 130 students of the department of Islamic Religious Education from State Islamic College (STAIN) Kudus came to Interfidei. They divided into two groups of arrivals, namely in the 1st and the 14th of May 2012. They

learnt how we, as an institution which concentrates on pluralism and interfaith dialogue, design and run the activities.

Under the guidance of Anisa Listiana, M. Ag [lecturer of the Comparative Religion] the group went to have a dialogue with Hare Krishna Community to learn about Hindu after visiting Interfidei.

The same thing was also done by the students from the Faculty of Ushuluddin (Department of Comparative Religion), State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. On May 7, 2012 at 8.30 a.m. up to 12.30 p.m., there were 60 students visited Interfidei office.

There, they held a dialogue with priest Penrad, Ms. Anis Farikhatin (religious teacher at Senior High School Piri 1 Yogyakarta) and Wening who was the alumni of Inter-Faith School the second. The dialogue brought a lot of new things to all parties. One of the surprising facts for these young intellectuals was that priest Penrad now is still studying at UIN Sunan Kalijaga for his Doctorate Degree.

kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut masih terkonsentrasi pada aspek-aspek yang populis dengan membuat program-program untuk penyantunan, perbaikan tempat ibadah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, atau juga pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Belum ada konsep yang mereka tawarkan mengenai pembenahan sistemik terhadap permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi-politik di negara yang masih banyak korban pemiskinan sistemik ini.

tanggal 7 Mei 2012, jam 8.30 – 12.30 WIB, sekitar 60 Mahasiswa berkunjung ke kantor Interfidei.

Di kantor interfidei mahasiswa Bandung tersebut berdialog dengan pendeta Penrad, bu Anis Farikhatin (Guru Agama di SMA Piri 1 Yogyakarta) dan Wening [alumni SLI- Sekolah Lintas Iman 2]. Sebuah dialogpun menghadirkan banyak hal baru untuk semua pihak. Salah satu fakta yang mengejutkan para intelektual muda ini adalah ternyata pendeta Penrad sedang belajar S3 di UIN Sunan kalijaga.



Seminar dan FGD Guru-guru Agama se-DIY

Bertempat di Gedung UC UGM, Interfidei bekerjasama dengan Forum Komunikasi Guru-guru Agama (FKGA) DIY menyelenggarakan Seminar dan FGD dengan tema “Pendidikan Agama di Indonesia sebagai Media Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Tantangan dan Peluang”. Acara yang dilaksanakan sehari penuh pada Sabtu, 26 Mei 2012 ini dibagi ke dalam 3 sesi, dua sesi seminar dan satu sesi FGD.

Bagian pertama seminar diisi oleh dua orang pembicara yang khusus menyoroti tema di atas dari perspektif agama-agama (Islam dan Kristen) yaitu Dr. Waryono Abdul Ghafur dan Dr. Tabita Kartika Christiani dengan focus bahasan mengenai peta pluralitas masyarakat dan pluralisme agama di Indonesia. Sedangkan bagian kedua seminar menghadirkan Prof. Dr. PM Laksono dan Bpk Darmaningtyas yang masing-masing memaparkan tentang tantangan perkembangan budaya (teknologi) (post) modern dalam dunia pendidikan dan tantangan administrasi dan birokrasi dalam dunia pendidikan/pendidikan agama di Indonesia.

Beberapa hal yang disoroti dalam sesi tanya jawab diantaranya adalah bahwa dalam membangun pendidikan karakter perlu dilakukan perbaikan terus menerus dari berbagai elemen seperti birokrasi, bahan ajaran dan pemerintah. Bahwa pendidikan agama di sekolah seharusnya lebih menekankan ke aspek etika ketimbang dogma agama dan bahwa

Seminar and FGD for Religious Teachers of DIY

Taking place at the UC building of UGM, Interfidei in collaboration with the Communication Forum of Religious Teachers (FKGA) of DIY organized a Seminar and Focus Group Discussion (FGD) under the theme of "Religious Education in Indonesia as a Medium of Character and Manner Education in the life of Nation and State: Challenges and Opportunities". The event took place in a full day on Saturday, May 26, 2012 and was divided into 3 sessions, two seminar sessions and one session of FGD.

The first session of the seminar was presented by two speakers, specially highlighting the theme above from religious perspective (Islam and Christian), Dr. Waryono Abdul Ghafur and Dr. Tabita Kartika Christiani with the focus on discussing the map of plurality in the society and religious pluralism in Indonesia. As for the second session of the seminar was presented by Prof. Dr. PM Laksono and Mr. Darmaningtyas, each elaborated on the challenges of cultural development (technology) in post-modern education world and administrative challenges as well as bureaucracy in education/religious education in Indonesia.

Some of the things highlighted in the question and answer session, among many, was that continuous improvement in building character education needs to be done from various elements such as bureaucracy, teaching materials and the

keteladanan dari orang tua adalah hal yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan karakter anak.

Dalam paparannya, PM Laksono menegaskan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan pencarian identitas Indonesia. Menurutnya, pendidikan meng-Indonesia harus difokuskan pada relasi sosial antar pihak yang berbeda. Sehingga hubungannya bukan guru-murid lagi, tetapi guru dan murid tumbuh bersama saling belajar dalam suasana bathin saling mengapresiasi. Lebih jauh PM Laksono menengarai bahwa ada cara pandang yang salah dalam melihat posisi guru di mana guru selama ini diposisikan dalam garis terdepan dalam pendidikan. Menurutnya, ujung tombak pendidikan itu adalah relasi yang terjalin dari berbagai pihak (guru, murid, orang tua, system, dan sebagainya) untuk membuat gerakan tumbuh bersama melahirkan kesejahteraan bersama.

Pada sesi FGD, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok untuk mendiskusikan tantangan dan peluang yang dihadapi dunia pendidikan agama dilihat dari tiga wilayah berbeda tetapi sangat berkaitan erat satu dengan yang lain yakni birokrasi, modernitas dan pluralisme agama.

Government. That religious education in schools should put more emphasis into aspects of ethics rather than religious dogma and that the example of parents is very important and decisive in the formation of the child's character.

In his speech, PM Laksono confirmed that education relates to identity search of Indonesia. He stated that education about Indonesia should focus on social relations among different parties. Therefore, the relationship is no longer between teacher and student, but teacher together with student grow together and learn each other in an atmosphere of mutual appreciation. Furthermore, PM Laksono believed that there is a wrong perception in seeing the teacher's position whereas teachers so far are put at the forefront in education. According to him, the cutting edge education lies on the establishment of relations from various parties (teachers, pupils, parents, system, and so on) to make the movement grow together and give birth to prosperity.

At the FGD session, participants were divided into three groups to discuss the challenges and opportunities facing the world religious education viewed from three different regions but are closely related to each other i.e. bureaucracy, modernity and religious pluralism.



Acara Peluncuran Buku "Angkat Pena Demi Dialog Papua" karya Neles Tebay.

Workshop Peran Guru Agama di Bidang Pendidikan Bina Damai

Fasilitator : Prof. Dr. Bambang Pranowo (LaKIP), Drs. Ahmad Baedowi MA (LaKIP), Dody Wibowo, SIP, MA (PSKP UGM), Titik Firawati, SIP, MA (PSKP UGM), Elga Sarapung (Interfidei), Wiwin Siti Aminah (Interfidei), Rizal Panggabean (PSKP UGM) dan Ahmad Baedowi (LaKIP)

Peserta : 50 guru agama di seluruh DIY

Tempat : Gedung UC UGM

Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 16 Juni 2012

Guru, termasuk guru agama, dapat memainkan peran penting dalam membina budaya damai di sekolah, supaya sekolah menjadi tempat yang ditandai dengan suasana, perilaku, dan proses belajar-mengajar yang damai dan nirkekerasan. Guru, siswa, dan staf sekolah berkomunikasi dan berinteraksi dalam rangka mendidik siswa supaya dapat tumbuh menjadi warganegara yang terdidik dan dapat menciptakan situasi yang mendukung perdamaian.

Akan tetapi, segala peristiwa dapat terjadi selama mereka berhubungan, termasuk konflik. Konflik dapat melibatkan murid dengan murid, guru dengan guru, murid dengan guru, dan unsur lain di lingkungan sekolah. Konflik tidak dapat dihindarkan sehingga harus dikelola agar keadaan menjadi lebih baik, supaya konflik tersebut tidak mengalami eskalasi dan menjadi kekerasan terbuka.

Workshop ini dilaksanakan dengan niat mengelola konflik secara konstruktif, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah antarpribadi, dan membangun dialog. Itu semuanya merupakan contoh kegiatan yang menekankan pada aspek pemberdayaan guru dan siswa. Model alternatif diyakini dapat mengembangkan kognisi dan emosi anak didik sehingga mereka menjadi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap persoalan sosial di sekeliling mereka.

Menurut Prof. Dr. Bambang Pranowo, kita harus terus berusaha bagaimana agar kehidupan

Workshop on The Role of Religious Teachers in Peace Building Education

Facilitators:

Prof. Dr. Bambang Pranowo (LaKIP), Drs. Ahmad Baedowi MA (LaKIP), Dody Wibowo, SIP, MA (PSKP UGM), Titik Firawati, SIP, MA (PSKP UGM), Elga Sarapung (Interfidei), Wiwin Siti Aminah (Interfidei), Rizal Panggabean (PSKP UGM) dan Ahmad Baedowi (LaKIP)

Participants: 50 Religious teachers from DIY

Place : UC Building UGM

Date : Saturday, June 16, 2012

Teachers, including the religious teachers, can play an important role in fostering peace culture at school so that school becomes a place with the atmosphere, behavior, and learning process of peace and non-violence. Teachers, students, and school staff should communicate and interact in order to educate students to grow into educated citizens that can create situations supporting peace.

However, all can happen during their time of interaction, including conflict. Conflict can involve students with students, teachers with teachers, students with teachers, and other elements in the school environment. A conflict is inevitable and thus should be managed in order to make things better, so that the conflict is not experiencing an escalation of violence and be open.

This workshop was held with the intention of managing conflict constructively, creating a mechanism to solve the interpersonal problems, and building a dialogue. Those are some examples of the activities highlighting the aspects of teachers and students empowerment. This alternative model is believed to be developing students' cognition and emotion so that they become people who have strong leadership, independent, and in charge of social issues around them.

According to Prof. Dr. Bambang Pranowo, we must keep on trying to create religious life in harmony because the existence of this nation begins with the spirit of togetherness. Togetherness is not

beragama yang harmonis itu harus tercipta karena keberadaan bangsa ini diawali oleh semangat kebersamaan. Kebersamaan bukan hanya antar bangsa, antar suku dan sebagainya tapi juga antar agama. Belajar dari sejarah, perjuangan dengan cara – cara militer, sejak jaman Teuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, I Gusti Ngurah Rai, Sultan Hasanuddin, dan Pattimura, semua bertujuan untuk melepaskan diri dari Penjajah. Tapi perjuangan yang hanya dengan pendekatan militer itu tidak pernah berhasil. Keberhasilannya justru setelah melalui perjuangan di bidang pendidikan dan kesadaran. Kesadaran tentang perlunya kita menjalin perasaan senasib, sepenanggungan itu dan diartikulasikan dalam bentuk yang memuncak pada kesadaran persamaan sebagai bangsa yang kemudian menjadi “Sumpah Pemuda”.

**PELUNCURAN DAN DISKUSI BUKU
“ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA”**

Penulis: Neles Keadabi Tebay

**Kata Pengantar: Franz Mjagnis Suseno,
A.A. Yewangoe, Azyumardi Azra**

**Penerbit: Institut Dialog Antariman di
Indonesia (Institut DIAN/Interfidei)**

Papua masih bergolak hingga kini. Kemerdekaan yang intinya jaminan rasa nyaman dari negara dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari masih menjadi impian bagi masyarakat Papua. Memang sekarang tidak ada pendekatan militer secara struktural di daerah itu seperti di era rejim orde baru. Tetapi bukan berarti rakyat Papua telah damai. Yang disayangkan, pemerintah masih saja menggunakan kacamata pusat dalam menyelesaikan permasalahan Papua hingga sekarang. Para elit politik sering mengabaikan suara-suara rakyat Papua dalam menyelesaikan konflik yang hingga sekarang telah menelan banyak korban serta meninggalkan trauma. Kepentingan politik tertentu

kita harus terus berusaha bagaimana agar kehidupan beragama yang harmonis itu harus tercipta karena keberadaan bangsa ini diawali oleh semangat kebersamaan. Kebersamaan bukan hanya antar bangsa, antar suku dan sebagainya tapi juga antar agama.

just a thing within a Nation, tribes and so forth, but also a thing among religions. Learning from history, military struggles since the era of Teuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro. I Gusti Ngurah Rai to Sultan Hasanuddin or Pattimura, all aim to break away from the colonizers. But the struggle only by military approach was never successful. Success was gained through the struggle in the field of education and awareness. Awareness about the need to weave the same feeling and the same responsibility which was later manifested in the form of consciousness as culminated in the equation as a nation known as "The Youth Pledge" (Sumpah Pemuda).

**Discussion and Book Launch "ANGKAT
PENA DEMI DIALOG PAPUA/LIFT PEN
FOR THE DIALOGUE OF PAPUA"**

Author: Neles Keadabi Tebay

**Foreword: Franz Magnis Suseno, A.A.
Yewangoe, Azyumardi Azra**

Publisher: Institut DIAN Interfidei

Papua is still in turmoil up to now. The independence, which means a guarantee of comfortable lives from the country in relation to living the daily life, is still a dream for the people of Papua. It is true that there is no more military approaches in that area as it was in the New Order Regime era. But it does not mean that the people of Papua live peacefully. Unfortunately, the Government still uses the central goggles in solving Papua's problems until now. The political elite often ignore the voices of Papuan people in resolving conflicts which until now have been swallowing a lot of victims as well as leaving trauma. Certain political interests still predominate in the process of making decision. Therefore, it is necessary to have a more humanistic

masih mendominasi dalam mengambil keputusan. Karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih humanistik dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Adalah Pater Neles Tebay yang mencoba menawarkan dan menguatkan opsi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dialog Damai. Interfidei memfasilitasi gagasan Pater Neles dengan menerbitkannya dalam sebuah buku yang telah kami bedah dan diskusikan pada publik.

Diskusi publik mengenai buku ini telah kami laksanakan dengan bekerjasama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP-UGM), Pusat Studi HAM-Universitas Islam Indonesia (UII), Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya (UAJ), Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP-UKDW), Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 20 Juni 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diskusi Buku ini menghadirkan 3 pembicara: Ahmad Syafi'i Ma'arif (sejarawan), M. Imam Aziz (PBBNU), PM Laksono (Antropolog) dan Adriana Elizabeth (LIPI).

Menurut Sultan HB X, Keynote Speaker dalam diskusi kali ini: "Dialog bukan solusi, melainkan media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog".

Sebelumnya, buku ini juga sudah diluncurkan dan dibedah di Ball Room Hotel Akmani, Jakarta, pada Selasa 29 Mei 2012.

approach in solving problems in Papua.

Fr. Neles Tebay tried to offer and strengthen an option – Peace Dialogue – to the Government in order to solve Papua's problems. Interfidei facilitated his idea by publishing a book which have dissected and discussed in public.

The public discussion about the book was held in collaboration with Center for Security and Peace Studies (CSPS) Gadjah Mada University, *Center for Human Rights Studies of the Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII)*, Center for Study of Human Rights and Democracy – Atma Jaya University, *Center for the Study and Promotion of Peace- Duta Wacana Christian University (PSPP-UKDW)*, and Faculty of Dakwah Sunan Kalijaga Islamic State University on June 20, 2012 which took place in Sunan Kalijaga Islamic State University. There were four speakers in this special occasion: Ahmad Syafi'i Ma'arif (historian), M. Imam Aziz (PBBNU), PM Laksono (Anthropologist) and Adriana Elizabeth (LIPI).

According to Sultan HB X, the keynote speaker in the discussion was: "Dialogue is not a solution, but a media or forum provided to initiate political communication which is still in a deadlock condition between Jakarta and Papua. Intense and regular communication is very essential in order to overcome tension, suspicion, and incredulity between those two places. Peace dialogue is not an instant thing, but it is a long-processed thing which needs to be prepared well. Although it is a complex thing, the dialogue is possible to be done by first creating the conditions which make the Parties think that they surely need to have a dialogue".

Previously, the book has also been launched and dissected at the Ball Room of Akmani Hotel, Jakarta, on Tuesday, May 29, 2012. In this event, speakers from various backgrounds were invited; such as the representative of government circles,

Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog".

Peluncuran buku ini menghadirkan para pembicara dari berbagai kalangan seperti dari kalangan pemerintah, Farid Husein (Tokoh & Pegiat Perdamaian Indonesia), Albert Hasibuan (Dewan Pertimbangan Presiden bidang Politik, Hukum dan HAM), TB. Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR-RI), para akademisi, jurnalis, aktivis pluralism: Tamrin Amal Tomagola (Dosen Pasca Fisipol, UI), Ahmad Suaedy (Peneliti Senior The Wahid Institute) Tri Agung Kristanto (Editor bidang Politik-Kompas) dan para tokoh agama: Franz Magnis Suseno (STF-Driyarkara), Djohan Effendi (Aktivis Gerakan Pluralisme di Indonesia) dan A.A. Yewangoe (Ketua PGI). Peluncuran buku ini terlaksana atas kerjasama Interfidei dengan beberapa lembaga yaitu Wahid Institute, Ma'arif Institut, Demos, Jaringan Antariman Indonesia dan ANBTI.[]

they were Farid Husein (Indonesian peace activist), Albert Hasibuan (President's Advisory Council for Politic, Law and Human Rights), T.B. Hasanuddin (member of the House of Representatives Commission I), academics, journalists, and also pluralism activists such as Tamrin Amal Tomagola (Lecturer in Social and Politic Faculty - UI), Ahmad Suaedy (senior researcher in Wahid Institute), Tri Agung Kristanto (editor for politic - Kompas) and the religious figures such as Franz Magnis Suseno (STF - Driyarkara), Djohan Effendi (Indonesian Pluralism Movement activist), A.A. Yewangoe (chairman of PGI). The launch of this book occurred in cooperation between Interfidei and several institutions; they were: Wahid Institute, Ma'arif Institute, Demos, Indonesian Inter-Faith Network and ANBTI.[]

MENGENAL FORUM KONSULTASI PARA PEMIMPIN AGAMA DI TANAH PAPUA

Papua bukan hanya indah karena keragaman kekayaan alamnya. Lebih dari itu, keberagaman agamapun melengkapi panorama itu. Karena itu, niat mulia untuk menegakkan serta menjaga perdamaian Papuapun terus menerus dilakukan berbagai pihak. Salah satu organisasi progresif yang memelopori hidup damai itu adalah Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama di Tanah Papua.

Bertepatan dengan Hari Doa Se-Dunia untuk Perdamaian, pada tanggal 21 September 2002, Forum Konsultasi para Pemimpin Agama di tanah Papua (FKPPA) mulai ditanamkan benihnya. Sebuah Ziarah Damai mengukuhkan komitmen menjaga masyarakat multikultur di tanah kaya emas itupun dilaksanakan. Pengalaman spiritual itu diadakan melalui "doa jalan" melintasi pusat-pusat kota di Jayapura. Seluruh pemimpin agama di Papua memimpin ziarah itu, diikuti masing-masing umat

GETTING TO KNOW THE CONSULTATION FORUM OF RELIGIOUS LEADERS IN THE LAND OF PAPUA

Papua is known to have the diverse natural beauty. Moreover, it also presents diversity in the field of religion. Therefore, goodwill to uphold and maintain peace at Papua is continuously performed by various parties. One of the progressing organizations that pioneered the peaceful life is the consultation forum of religious leaders in the land of Papua.

At the world day of prayer for peace, on September 21, 2002, a consultation forum of religious leaders in the land of Papua (FKPPA) began its mission. A pilgrimage of peace was held to reinforce the commitment of keeping the multicultural society in the land of gold. Such spiritual experience was held through a "walk of prayer" across downtowns in Jayapura. All religious leaders of Papua led the pilgrimage, followed by their followers as well as community leaders.

serta pemimpin masyarakat. "Doa mempersatukan kami!" pengakuan serentak para peziarah.

Pengalaman yang menyatukan ini mulai tumbuh kembang saat merayakan "Injil masuk di Tanah Papua", 5 Februari 2003. Semula, perayaan "Hari" ini hanya dilakukan oleh Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua sebagai "Hari Pekabaran Injil (HPI)". Tetapi setelah pengalaman ziarah tersebut, diperluas menjadi perayaan semua gereja dan berkembang menjelma sebuah perayaan semua agama yang ada di Papua. Oleh karena itu, tekanannya menjadi berubah. Dari Hari Pekabaran Injil menjadi "Papua Tanah Damai".

Tema ini menunjukkan bahwa agama-agama yang ada di Papua memiliki komitmen bersama menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Artinya, agama-agama (pemimpin dan umatnya) bersedia dan bertekad untuk menjalankan misi profetis dan misi spiritualitasnya bagi kepentingan Papua sebagai Tanah Damai. Tujuan mulianya agar warga masyarakat dapat hidup dengan layak, pantas dan dihargai, sebagaimana warga masyarakat lainnya di wilayah lain di Indonesia.

Saat ini, agama-agama yang terlibat dalam forum ini masih sebatas agama-agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam diwakili oleh Majelis Ulama Papua, Agama Kristen Protestan diwakili oleh 4 organisasi Kristen yang terbesar (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Papua, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia di Tanah Papua, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Misi Papua), Keuskupan Jayapura, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Papua serta MBI (Majelis Buddha Indonesia) Provinsi Papua.

"Prayer unites us!" was the simultaneous state of the pilgrims.

The uniting experience started to grow at the celebration of "Gospel in the Land of Papua", February 5, 2003. Originally, the celebration was only done by the Evangelical Christian Church (GKI) in *Tanah Papua* as the "Day of Evangelists" (HPI). But after having experienced the pilgrimage, it expanded into a celebration of all churches and eventually turned into a celebration of all religions in Papua. Therefore, the emphasis changed; from the Day of Evangelists to the name of "Papua, Land of Peace".

The theme shows that religions existing in Papua own the same commitment of making Papua, land of peace. Meaning, religions (the leaders and their followers) are willing and determined to run the prophetic mission and spiritual mission for the benefit of Papua as the land of peace. The noble purpose is to provide the residents with worthy and appreciated living; as well as to other citizens in other regions of Indonesia.

Papua bukan hanya indah karena keragaman kekayaan alamnya. Lebih dari itu, keberagaman agamapun melengkapi panorama itu. Karena itu, niat mulia untuk menegakkan serta menjaga perdamaian Papuapun terus menerus dilakukan berbagai pihak. Salah satu organisasi progresif yang memelopori hidup damai itu adalah Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama di Tanah Papua.

Currently, religions involved in the forum are still limited to the nation's recognized religions: Islam was represented by the Indonesia Ulemas Council of Papua, Protestant was represented by 4 major Christian organizations (The *Indonesian Communion of Churches* (PGI) in Papua, the Communion of Pentecostal Churches in Indonesia in *Tanah Papua*, Communion of Evangelical Churches and Institutions in Indonesia, Seventh-day Adventist Church of Papua, Roman Catholic Diocese of Jayapura, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) of Papua and Buddhist Council of Papua (MBI).

Religious leaders of Papua are fully aware that the prophetic task is not an easy task to do. This is because peace refers to more than just a state without

Para pemimpin agama di Papua menyadari sepenuhnya, bahwa tugas profetis tersebut bukanlah tugas yang mudah. Hal ini karena tidak sekedar sebuah kedamaian dalam arti tanpa perang atau konflik. Tetapi DAMAI dalam arti tidak ada ketertinggalan pendidikan, kemiskinan, persoalan ketidakadilan ekonomi, sosial, politik. Aplikasinya, misalnya, adanya jaminan kesehatan, jaminan keamanan, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya.

Ada 9 unsur pokok sebagai wujud DAMAI yang dimaksudkan yaitu harmoni, komunikasi dan informasi, rasa aman dan nyaman, keadilan dan kebenaran, kebersamaan dan saling menghargai, kemandirian, kesejahteraan, pengakuan dan harga diri serta partisipasi.

Dari pengalaman yang membahagiakan itu, pada tanggal 4 Desember 2006, para Pemimpin Agama di Tanah Papua sepakat membentuk satu Forum dengan nama, FORUM KONSULTASI PARA PEMIMPIN AGAMA DI TANAH PAPUA (FKPPA).

Visi: Terwujudnya "Papua Tanah Damai".

Misi:

1. Menggalang kebersamaan pikiran, sumber daya dan tindakan para Pemimpin Agama di Tanah Papua.
2. Melakukan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi dan budaya serta kehidupan umat beragama.
3. Melakukan kegiatan bersama untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah-masalah



Mgr. Leo Labalajar memberi laporan hasil kelompok pemimpin FKPPA

harmony, communication and information, security and comfort, justice and truth, unity and mutual respect, independence, well-being, self-esteem, recognition and participation.

From such joyful experience, on December 4, 2006, religious leaders in the land of Papua agreed to form a Forum namely CONSULTATION FORUM OF RELIGIOUS LEADERS IN THE LAND OF PAPUA (FKPPA).

Vision: Creating "Papua, Land of Peace".

Mission:

1. Raising synergized thoughts, resources and actions of religious leaders in the land of Papua.
2. Conducting studies to social, economic and cultural problems, as well as towards religious life.
3. Performing joint activities to help communities that are experiencing social problems.
4. Conducting coaching, counseling, preach and da'wah to embody the unity of religion.

The goal is to synergize the thoughts and resources from leaders, experts and religious communities to build an advanced, prosperous,

war or conflict. It refers to PEACE in the sense of no hunger, no educational backwardness, no poverty, no injustice in economy, social and politics. Its realization can be exemplified like in health coverage, security assurance, no violence and others.

There are 9 fundamental elements as a realization of PEACE which are

sosial kemasyarakatan.

4. Melakukan penyuluhan, pembinaan, khotbah dan dakwah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Tujuannya untuk mensinergikan pikiran-pikiran dan sumber daya para pemimpin, tokoh, pakar dan umat beragama untuk membangun masyarakat yang maju, sejahtera, cerdas, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama.

Dalam rangka mewujudkan keinginan luhur itu, FKKPA telah melaksanakan banyak kegiatan. Di antaranya, melakukan lomba pidato dengan tema "Papua Tanah Damai", membentuk organisasi pemuda, FORMULA (Forum Pemuda Lintas Agama), kunjungan ke Mindanao, lokakarya Guru-Guru Agama dalam kerjasama dengan Interfidei, Yogyakarta, Pelatihan untuk Para Pemimpin Agama untuk menjadi Fasilitator, dan masih banyak lagi.

FKPPA berkantor di Jayapura, Jalan Kabupaten 1/5, APO Kota Jayapura, Papua. Telp. 0 9 6 7 - 5 3 6 2 6 5 . E m a i l : ompung_bonar@yahoo.co.id.[]

intelligent society, as well as to form mutual respect among fellow religions.

In order to realize the lofty wishes, FKKPA has carried out many activities. Among other are conducting speech contest with the theme of "Papua Land of Peace", forming FORMULA youth organization (Inter-religious Youth Forum), paying a visit to Mindanao, giving workshop to teachers of religion - in cooperation with Interfidei, Yogyakarta, giving training for religious leaders to become facilitators, and many more.

FKPPA is based in Jayapura, Kabupaten street 1/5, APO Jayapura City, Papua, Indonesia. Phone 0 9 6 7 - 5 3 6 2 6 5 . E m a i l : ompung_bonar@yahoo.co.id.[]



Tim Fasilitator (Neles Tebay, Theo V.d. Broek, Rizal Panggabean, Elga Sarapung) pada acara FKKPA

REFLEKSI

Oleh: Elga Sarapung

Saya pikir, banyak di antara kita yang setuju dengan ungkapan ini “agama tidak perlu dibela”, “Tuhan pun tidak perlu dibela”. Di sini kata “dibela” mengandung arti “mempertahankan” dan mengamininya secara simbolistik-ritualistik atas dasar kepercayaan terhadap agama yang diyakininya. Ini menjadi sangat berbahaya, karena antara “keyakinan” terhadap agama dan praktek keagamaan atas dasar keyakinan tersebut hanya akan berbuah – dan itu yang akan merupakan sisi lain dari praktek “membela” agama-, yaitu menganggap agama yang lain tidak benar atau dianggap sesat. Karena itu, harus meyakini agama yang sama dengan agama yang saya yakini. “Membela Tuhan pun” mendapat kategori simbolistik semacam itu. Bila berbeda atau dianggap “salah” menurut ukuran “harfiah” maka dianggap menodai agama sekaligus “menghina” Tuhan.

Hasil dari kedua hal itu, yang paling menonjol, adalah sampai melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Mengapa? Karena tidak pernah ada ruang bagi para penganut agama dengan model seperti itu, untuk berefleksi secara imani dengan spiritualitas mendalam tentang apa sebenarnya makna seluruh ajaran dan simbol-simbol agama yang diyakini bagi kehidupan secara pribadi, dalam berkeluarga/berumahtangga, bermasyarakat dan lebih luas lagi berbangsa.

Yang akan selalu muncul adalah bagaimana supaya agama saya “nampak” secara simbolistik di masyarakat. Bagaimana supaya orang lain tahu bahwa saya (seolah-olah) “beragama”. Karena itu, jangan heran berbagai simbol agama penuh sesak di mana-mana di Indonesia. Mulai dari bangunan rumah ibadah yang beraneka-ragam arsitektur dan kelengkapannya, buku-buku keagamaan, asesoris agama di warung, toko, mall, sampai kepada penuh sesaknya rumah-rumah ibadah. Lagi-lagi semua itu menghasilkan lebih banyak “kulit luar” dari agama, bukan “the inner side” dari makna agama itu sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan sederhana, misalnya, mengapa saya beragama dan berkeyakinan?. Mengapa

REFLECTION

By: Elga J. Sarapung

I think that many of us must have agreed with the statement saying “Religion needs no defense, as God needs no justification”. In this context, the word “defense” contains the meaning of the act of having faith on it and believing its symbol and ritual as parts of the belief itself. This turns out to be so dangerous. It is because both faith towards religion and religious practice on behalf of faith will only result in, and which is the other side of religious defending practice, considering other religions to be untrue or misleading. Therefore, people must believe the same religion. Defending God even earns such symbolist category. Those being different or assumed to be wrong according to 'literal' measurement will be considered as staining religion as well as insulting God.

The result of two things above, the most notably, breaches to conducting violence, even leading to murder. Why? Because there is never be a space for religious believer of that model to reflect in faith with deep spirituality about the real meaning of religious teaching and symbol believed for the life of a person, family and the nation.

What will always recur is how to make my religion “appear” symbolist in the society. How to make other believe that I (appear) am religious? Therefore, do not be taken into surprise if there are lots of religious symbols in Indonesia, starting from the religious architecture and its furniture, religious books, religious accessories in stores and malls to the crowd in houses of worship. Again, it all results in more outer skin rather than “*the inner side*” of the religion itself.

There are simple questions like, “Why am I having religion and faith? Why am I Protestant, Catholic, Moslem, Buddhist, Hindus and else? Will my religion mean anything to me and my neighbors, or to Indonesians? What does it mean in 'Indonesian'”

saya beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan seterusnya?. Apa artinya bagi saya dan bagi tetangga saya, bagi masyarakat Indonesia, bila saya beragama, apapun agama dan keyakinan saya?. Apa maknanya dalam konteks ber-Indonesia?. Dalam konteks semacam ini, maka soal “apa perlu agama atau apa perlu saya beragama?” bukan merupakan persoalan. Yang menjadi soal adalah bagaimana ekspresi praksis setiap orang beragama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, terkait dengan soal kemanusiaan, soal ketidakadilan dan lain sebagainya. Sebab, kecenderungan yang sedang merajalela sekarang ini adalah orang lebih bersemangat untuk membela berbagai “simbol-simbol” agama yang serba sementara manfaatnya, daripada membela kehidupan yang adil bagi para korban ketidakadilan.

Kenyataan semacam itu, diperparah lagi dengan ketidakjelasan dan ketidaktegasan bahkan pembiaran dari dan oleh negara terhadap berbagai “buah” hasil praktek keberagaman yang dangkal semacam itu. Yang menjadi korban adalah mereka yang sama-sama punya hak hidup, hak untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan keyakinan yang diyakininya. Bahkan, sampai dengan merusak dan membunuh nyawa pun para pelaku tidak pernah diproses hukum sesuai dengan keadilan dan kebenaran yang konkrit menurut hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terkesan, ada ketakutan yang kuat di kalangan pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum yang adil dan beradab.

Sikap “takut” dan “mencari aman” ini diperparah lagi dengan berbagai kepentingan politik di Indonesia yang sudah benar-benar masuk sampai ke dalam “sum-sum” kehidupan beragama, kehidupan berdemokrasi, kehidupan yang didambakan beradab di kalangan warga masyarakat Indonesia.

Bila melihat keadaan (yang sebenarnya) sudah cukup transparan ini, memang akan memberi keputusan. Tetapi, tidak! Gerakan Antariman Indonesia, melalui Jaringan Antariman, atau yang dapat juga disebut dengan Gerakan Pluralisme Indonesia yang tersebar di mana-mana, yang sudah sejak lama ditumbuh-kembangkan oleh orang-orang seperti Abdurrahman Wahid, Y.B. Mangunwijaya, Gedong Bagoes Oka, Th. Sumartana dan banyak lagi, termasuk para pendahulu mereka, tidak pernah akan padam. Tidak akan berhenti hanya karena “kelakuan dan

context?” In such context, then the question of “Is religion necessary, or should I be having religion?” will no longer be problems. What becomes the problem is then the praxis expression of all religious persons in daily life. Say for example, in relation to humanity, injustice and other issues. It is because the recurring tendency nowadays is that people are more encouraged to defend religious symbols of temporary use, instead of defending the fair living for the victims of injustice.

Such fact is worsened by the obscurity and less strict actions or even carelessness from the government towards various kinds of shallow practice of diversity. Those become the victims are the people having the rights to live, to conduct religious practice and to believe to a particular faith. Even worse, there are some cases of harm and murder that the perpetrators remain not processed by law in accordance to concrete justice and truth based on Pancasila and the constitution. It gives the impression that the government, security apparatus, and legal apparatus fear to be just and civilized.

The “fear” and “seeking safe” attitude is worsened again with various political interests in Indonesia which already sets into the core of religious life, the democratic life, and the civilized life that the citizens of Indonesia dream about.

Looking at the (real) transparent fact, desperation will seem to appear. Yet NO! Indonesian Interfaith Movement, through interfaith network, or also known as Indonesian Pluralism Movement spreading to nearly every corner of this nation has been developed by figures like Abdurrahman Wahid, Y.B. Mangunwijaya, Gedong Bagoes Oka, Th. Sumartana and many of their predecessors; it will never stop shining. It will not stop only because of “religious attitude and stance” and “governing attitude and stance” from a bunch of opportunist people choosing to set example to this nation and the future generation of religious and governing practices which is uncivilized and inhumane. We will continue to move forward and defend the civilized, humane, and just life. For us, there lies the meaning of “defending religion”; “defending God”.

sikap beragama” serta “kelakuan dan sikap bernegara dan berpemerintahan” dari sekelompok orang yang oportunis dan lebih cenderung memilih untuk memberi contoh kepada bangsa ini, generasi mendatang, praktek-praktek beragama dan bermasyarakat yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Kami akan tetap bergerak maju dan membela kehidupan yang beradab, berperikemanusiaan, dan berkeadilan. Bagi kami, disitulah makna “membela agama”; “membela Tuhan”. Tidak lain adalah membela kehidupan setiap warga Negara, yang adalah sesama manusia, secara adil dan beradab. Pada titik itulah agama pun menjadi bermakna bagi manusia. Pada titik itulah perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yang Ilahi, selalu berlangsung. Itulah iman, the inner side dari agama, sesuatu yang hidup dan menghidupkan.[]

It is, not to be mistaken, defending the life of every citizen, fellow mankind, in a just and civilized way. At that point, religion holds a meaning for mankind. Also, it remarks the meeting with God, the almighty, to be continuously. That is faith, the inner side of religion, a life and living thing.[]

*“Tanpa Kekerasan
adalah senjata
milik orang yang perkasa*

- Mahatma Gandhi -

AGENDA

1. Buka Puasa Bersama Masyarakat Kampung Banteng, Kamis 9 Agustus 2012
2. Lokakarya Guru-Guru Agama Se-DIY "Meningkatkan Peran dan Fungsi Guru Agama di Sekolah sebagai Aktor Perdamaian Berbasis Antar-iman", 21-23 September 2012 di Wisma Camelia, Kaliurang, Yogyakarta.
3. Evaluasi dan Refleksi Program Pendidikan Interfidei dan Pertemuan Strategi Jaringan Antariman, 10-12 Oktober 2012
4. Rapat Pengurus Institut DIAN/Interfidei 2012, 13-14 Oktober 2012
5. Lokakarya Guru-Guru Agama di Kupang, bekerjasama dengan Jaringan Perempuan Indonesia Timur, November 2012.

AGENDA

1. Iftar with the Banteng community, Thursday, August 9, 2012
2. Workshop for Religious Teachers in Yogyakarta "Enhancing the Role and Function of Religious Teacher in Schools as an Interfaith Actor of Peacebuilding", September 21-23, at Wisma Camelia, Kaliurang, Yogyakarta.
3. Evaluation and Reflection of Interfidei's Education Program and Strategic Meeting of Interfaith Network, October 10-12, 2012
4. Board Meeting of Institute DIAN/ Interfidei, October 13-14, 2012
5. Workshop for Religious teachers in Kupang, NTT, November 2012 in cooperation with Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT/Eastern Indonesia Women Network), November 2012

Yayasan Dian/Interfidei Dian/Interfidei Foundation

Board Members: Djohan Effendi, Daniel Dhakidae; **Executive Board:** A. Elga J. Sarapung (Director), Reta (Secretariate); Eko Putro Mardiyanto (Finance); **Department Coordinators:** Elga Sarapung (Education/Networking/Library/Documentation/Research); Vita (Publication/Institution/Fundraising/HRD); **Staffs:** Sarnuji, Wiwin, Siti Aminah; **Address:** Jl. Banteng Utama 59, Perum. Banteng Baru Yogyakarta, 55581-Indonesia, Ph.: 0274-880149, **Fax.:** 0274 -887864, E-mail :dianinterfidei@yahoo.com. Website:<http://www.interfidei.or.id//>;No.Rek: Yayasan DIAN-Interfidei, Bank BNI Cabang UGM, Capem Pasar Colombo, No. 0039234672.

**Demi Pengembangan Newsletter ini, kami terbuka terhadap saran dan kritik anda.
We are open to Suggestions and criticisms in order to improve this Newsletter.**